

II. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan Pasal 37 "... dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Berdasarkan rumusan tersebut, telah dikembangkan Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, secara utuh bersama mata pelajaran lainnya, sudah dimuat dalam semua ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Silabus, Buku Teks Siswa dan Buku Pedoman Guru, serta Pedoman Implementasi Kurikulum. Dengan kata lain tentang apa, mengapa, dan bagaimana mata pelajaran PPKn secara imperatif berkedudukan dan berfungsi dalam konteks sistem pendidikan dan kurikulum secara nasional sudah didukung dengan regulasi yang sangat lengkap.

Namun demikian, dalam konteks kurikulum sebagai realita proses pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, yakni kurikulum sebagai kenyataan yang harus terjadi sebagai proses belajar peserta didik dan proses pembelajaran guru, masih dirasakan perlu adanya buku pedoman yang operasional dan utuh bagi para guru PPKn sehari-hari. Untuk itulah dikembangkan Buku Pedoman Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini.

Selain itu, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi para pendidik dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses pembelajaran berbasis proses keilmuan (*scientific approach*) serta penilaian otentik (*authentic assessment*) pada mata pelajaran PPKn serta pentingnya perubahan cara pandang (*mindset*) para guru PPKn dalam pembelajaran PPKn Kurikulum 2013.

B. Tujuan

Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para Guru PPKn dalam;

1. membangun persepsi dan sikap positif terhadap mata pelajaran PPKn sesuai dengan ide, regulasi, karakteristik psikologis-pedagogis, dan fungsinya dalam konteks sistem pendidikan nasional;
2. memahami secara utuh dan menyeluruh karakteristik PPKn Kurikulum 2013 sebagai landasan membangun pola sikap dan pola perilaku profesional sebagai guru PPKn;
3. memfasilitasi tumbuhnya kesejawatan (kolegialisme) guru PPKn untuk mewujudkan pembelajaran PPKn dan pengembangan budaya kewarganegaraan di lingkungan satuan pendidikan dan lingkungan sosial-Budayaal peserta didik; dan
4. mengembangkan diri sebagai guru PPKn yang profesional dan dinamis dalam menyikapi dan memecahkan masalah-masalah praktis terkait visi dan misi PPKn di lingkungan satuan pendidikan.

C. Ruang Lingkup

Buku Pedoman Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini secara garis besar terdiri atas sembilan bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Karakteristik Mata Pelajaran PPKn, Bab III Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn, Bab IV Desain Pembelajaran, Bab V Model Pembelajaran, Bab VI Penilaian Otentik, Bab VII Media dan Sumber Belajar, Bab VIII Guru sebagai Pengembang Budaya Sekolah, Bab IX Penutup.

Secara lebih terinci, ruang lingkup Buku Pedoman Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang mengapa ada buku pedoman ini, mengapa pedoman ini diperlukan, operasional antara dokumen kurikulum, buku teks pelajaran/siswa dan buku pedoman guru, penekanan pada perubahan kurikulum 2013 sehingga perlu perubahan mindset dan praktikal dalam pola mengajar. Dalam Bab I juga menguraikan tentang tujuan buku pedoman, ruang lingkup buku pedoman dan sasaran pengguna buku pedoman ini.

Bab II Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, menguraikan rasional mengapa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada dan penting serta relevansinya dengan konteks sekarang. Di dalam bab ini juga memuat rasional, tujuan, dan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Bab III Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn, menguraikan tentang alur pengembangan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) SMA/MA.

Bab IV Desain Pembelajaran, menguraikan tentang kerangka pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran serta rancangan pembelajaran aspek pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan aspek sikap serta kaitan antara KD pada KI 3 dan 4 dengan KD pada KI 1 dan 2. Materi pembelajaran yang ada di KI 3 dan praktik di KI 4 (pembelajaran langsung), pembentukan sikap dan penanaman nilai ada di KI 1 dan 2 (pembelajaran tidak langsung). Dalam bab ini juga menguraikan tentang pendekatan pembelajaran melalui alur proses lima tahap pembelajaran.

Bab V Model Pembelajaran, menguraikan tentang macam-macam model pembelajaran (karakteristik masing-masing model pembelajaran). Bab ini

juga menguraikan tentang pemilihan model dan keterkaitan materi dan model pembelajaran.

Bab VI Penilaian Otentik, menguraikan tentang strategi dasar penilaian PPKn, teknik dan bentuk penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dan melaksanakan penilaian serta pelaporan hasil belajar.

Bab VII Media dan Sumber Belajar, menguraikan tentang Media belajar PPKn sebagai praktek, alat atau saluran yang digunakan serta sumber belajar PPKn (referensi seperti perpustakaan, masyarakat, kelompok sasaran tertentu yang akan diadakan perubahan pemitraan).

Bab VIII Guru Sebagai Pengembang Budaya sekolah, menguraikan tentang Budaya sekolah sebagai aktivitas belajar, peran guru mengembangkan sekolah sebagai aktivitas belajar, menampilkan figur atau sosok guru sebagai multi fungsi dan keteladanan. Selain itu juga menguraikan tentang guru melakukan kerjasama antara guru sesama mata pelajaran, dengan guru mata pelajaran lain, guru dengan siswa, guru dengan orang tua dan guru dengan masyarakat.

Bab IX Penutup, menguraikan tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk satu Indonesia; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kiprah kekinian dan ke masa depan.

D. Sasaran

Buku Pedoman Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini disusun untuk kepentingan: Guru PPKn, kepala sekolah, Pengawas, Dinas Pendidikan, Orang Tua dan pemangku kepentingan (*Stake Holder*) lainnya dalam rangka kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Memberikan pemahaman tentang:
 - latar belakang mata pelajaran PPKn
 - misi mata pelajaran PPKn
 - substansi mata pelajaran PPKn
 - karakteristik mata pelajaran PPKn
 - strategi pembelajaran saintifik, dan
 - penilaian otentik mata pelajaran PPKn
- 2) Meningkatkan kemampuan:
 - beradaptasi dengan tuntutan PPKn;
 - melaksanakan sistem pembelajaran dan penilaian PPKn secara tepat;
 - mengoptimalkan pemanfaatan media, alat, dan sumber belajar PPKn;
 - memelihara dan meningkatkan profesionalitas sebagai guru PPKn
 - membangun manajemen yang mendukung sistem pembelajaran dan penilaian PPKn secara tepat.
- 3) Menjadi acuan dalam:
 - merumuskan indikator pencapaian kompetensi dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kapasitas, karakteristik dan sosial budaya daerah, sekolah/satuan pendidikan dan peserta didik;
 - merancang pembelajaran dari KI dan KD serta silabus ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar secara lebih inovatif, kreatif, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, karakteristik dan sosial budaya daerah, sekolah/satuan pendidikan dan peserta didik;

- mengembangkan dan memanfaatkan sumber belajar lebih kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kondisi sosial budaya daerah.

BAB II
KARAKTERISTIK MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)

A. Rasional

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren).

Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Bertolak dari berbagai kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan paedagogis, mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- 2) Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter;
- 3) Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Pendekatan *pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach)* yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan perhatian

pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3, keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual. Pendekatan tersebut memiliki langkah generik sebagai berikut:

- a. Mengamati (*observing*),
- b. Menanya (*questioning*),
- c. Mengumpulkan Informasi (*exploring*),
- d. Menalar/mengasosiasi (*associating*)
- e. Mengomunikasikan (*communicating*)

Pada setiap langkah dapat diterapkan model pembelajaran yang lebih spesifik, misalnya:

- untuk mengamati antara lain dapat menggunakan model menyimak dengan penuh perhatian;
- untuk menanya antara lain dapat menggunakan model bertanya dialektis/mendalam;
- untuk mengumpulkan informasi antara lain dapat menggunakan kajian dokumen historis;
- untuk menalar/mengasosiasi antara lain dapat menggunakan model diskusi peristiwa publik;
- untuk mengomunikasikan antara lain dapat menggunakan model presentasi gagasan di depan publik (*public hearing*).

Dalam konteks lain, misalnya model yang diterapkan berupa model project seperti Proyek Belajar Kewarganegaraan yang menuntut aktivitas yang kompleks waktu dan panjang dan kompetensi yang lebih luas kelima langkah generik diatas dapat diterapkan secara adaptif pada model tersebut.

- 5) Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (*authentic instructional and authentic learning*) dalam bingkai integrasi Kompetensi Inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik bersikap dan berpikir ilmiah (*scientific*) yaitu pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.
- 6) Model Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*). Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik.

B. Tujuan

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- 2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- 4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budayaal.

C. Ruang Lingkup

Dengan perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka ruang lingkup PPKn meliputi:

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa
- 2) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia
- 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Dengan demikian PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

- 1) PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic education di USA, citizenship education di UK, talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.
- 2) PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003.

BAB III
KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)

Permendikbud tentang Standar Isi memuat kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Dalam usaha mencapai Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa Tingkat Kompetensi. Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian Kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat Kompetensi terdiri atas 8 (delapan) jenjang yang harus dicapai oleh peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan Tingkat Kompetensi tersebut ditetapkan Kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Secara hirarkis, kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan Kompetensi yang bersifat generik pada tiap Tingkat Kompetensi. Kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap muatan kurikulum. Selanjutnya, Kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan Kompetensi Dasar pada pengembangan kurikulum satuan dan jenjang pendidikan.

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap Tingkat Kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran dan penilaian pada tingkat yang sama memiliki karakteristik yang relatif sama dan memungkinkan terjadinya akselerasi belajar dalam 1 (satu) Tingkat Kompetensi. Selain itu, untuk Tingkat Kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi Tingkat Kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian.

Kompetensi dalam setiap tingkat kompetensi akan menjadi Kompetensi Inti pada setiap kelas atau program. Kompetensi Inti merupakan tingkat

kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut:

1. kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
2. kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
3. kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
4. kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

Pengorganisasi ruang lingkup materi PPKn dikembangkan sesuai dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari jenjang SD/MI sampai dengan jenjang SMA/MA/SMK. Prinsip mendalam berarti materi PPKn dikembangkan dengan materi pembelajaran sama, namun semakin tinggi tingkat kelas atau jenjang semakin mendalam pembahasan materi. Prinsip meluas berarti lingkungan materi dari keluarga, teman pergaulan, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta pergaulan dunia. Kedalaman dan keluasan materi dapat dilihat dari rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang merupakan gradasi setiap kompetensi, yaitu :

1. Pengembangan KI dan KD ranah sikap jenjang SD/MI pada kemampuan menerima dan menjalankan, pada jenjang SMP/MTs kemampuan menghargai dan menghayati, dan jenjang SMA/SMK kemampuan menghayati dan mengamalkan.
2. Pengembangan KI dan KD ranah pengetahuan jenjang SD/MI pada kemampuan mengetahui , pada jenjang SMP/MTs kemampuan memahami dan menerapkan, dan jenjang SMA/SMK kemampuan memahami, menganalisa dan mengevaluasi.
3. Pengembangan KI dan KD ranah keterampilan jenjang SD/MI pada kemampuan mengamati dan menanya; pada jenjang SMP/MTs kemampuan mencoba, menyaji dan menalar; dan jenjang SMA/SMK kemampuan menyaji.
4. Ruang lingkup pengetahuan Jenjang SD pada pengetahuan faktual dan konsep; jenjang SMP pengetahuan faktual, konsep, dan prosedur; dan jenjang SMA pengetahuan faktua, konsep, prosedur dan metakognitif (teori).
5. Lingkungan pengembangan pengetahuan pada jenjang SD pada keluarga dan teman bermian; jenajng SMP pada sekolah dan pergaulan sabaya; jenjang SMA pada bangsa dan negara serta pergaulan dunia

Gradasi kedalaman dan keluasan materi ini perlu dipahami oleh guru agar pengembangan materi pembelajaran dan pembelajaran tidak saling tumpang tindih antarjenjang.

DOMAIN	ELEMEN	SD	SMP	SMA - SMK
SIKAP	Proses	Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan		
	Individu	BERIMAN, BERAKHLAK MULIA (JUJUR, DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, PEDULI, SANTUN), RASA INGIN TAHU, ESTETIKA, PERCAYA DIRI, MOTIVASI INTERNAL		
	Sosial	TOLERANSI, GOTONG ROYONG, KERJASAMA, DAN MUSYAWARAH		
	Alam	POLA HIDUP SEHAT, RAMAH LINGKUNGAN, PATRIOTIK, DAN CINTA PERDAMAIAN		
PENGETAHUAN	Proses	Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi		
	Obyek	ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, DAN BUDAYA		
	Subyek	MANUSIA, BANGSA, NEGARA, TANAH AIR, DAN DUNIA		
KETERAMPILAN	Proses	Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta		
	Abstrak	MEMBACA, MENULIS, MENGHITUNG, MENGGAMBAR, MENGARANG		
	Konkret	MENGUNAKAN, MENGURAI, MERANGKAI, MEMODIFIKASI, MEMBUAT, MENCIPTA		

Lingkup Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi PPKn di SMA/MA/SMK/MAK

Tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKn sesuai dengan Permendikbud tentang Standar isi pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ PAKET C sebagai berikut:

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
5	X - XI	<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis, dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Menyajikan bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil Nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan sikap positif terhadap NKRI dilihat dari konteks geopolitik • Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender • Mengamalkan dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban 	<p>Republik Indonesia Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika • Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia
6	XII	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan sikap positif terhadap nilai fundamental, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila • Menganalisis pengelolaan kekuasaan Negara sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 • Menganalisis strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika • Menganalisis penyelenggaraan Negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila • Dinamika pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan negara dan kekuasaan kehakiman • Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) • Strategi yang diterapkan dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika • Dinamika penyelenggaraan

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		federal <ul style="list-style-type: none"> • Mengamalkan (dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab) • makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban 	negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar jenjang SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C sesuai dengan Permendikbud sebagaimana tercantum dalam lampiran I

BAB IV DESAIN PEMBELAJARAN PPKn

Desain pembelajaran pada matapelajaran PPKn menguraikan keterkaitan antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator, dan Tujuan Pembelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilai pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan standar pendidikan yang diharapkan dimiliki oleh semua peserta didik berdasarkan tingkatan pendidikannya, seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SKL terdiri dari 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap mencakup 4 (empat) elemen yaitu proses, individu, sosial, dan alam. Ranah pengetahuan mencakup 3 (tiga) elemen yaitu proses, obyek, dan subyek, sedangkan ranah keterampilan terbagi 3 (tiga) elemen yaitu proses, abstrak, dan kongkrit. Setiap elemen digunakan kata-kata operasional yang berbeda, (lihat Bab III di atas). Selanjutnya SKL diterjemahkan kedalam Kompetensi Inti yang berada dibawahnya.

Kompetensi inti (KI) merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan/mewujudkan isi dari SKL. Isi KI harus mencerminkan harapan dari SKL. Kompetensi inti (KI) terdiri dari KI-1 sampai dengan KI-4. Rumusan setiap KI berbeda sesuai dengan aspeknya (lihat Bab III di atas). Untuk mencapai kemampuan yang terdapat di dalam Kompetensi inti (KI) perlu diterjemahkan kedalam Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan aspek pada setiap KI.

Kompetensi dasar (KD) merupakan penjabaran dari komponen yang ada didalam Kompetensi Inti (KI), yang berisi berbagai materi pembelajaran yang secara langsung akan dapat diterapkan guru di sekolah. KD digunakan sebagai dasar untuk menyusun indikator dan tujuan pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Indikator dan tujuan pembelajaran merupakan komponen yang harus ada dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Indikator adalah penanda perilaku (sikap, pengetahuan dan keterampilan) terkait isi yang akan digunakan guru sebagai landasan pembelajaran. Indikator dalam RPP harus dirumuskan dengan jelas dan disusun dalam urutan yang logis untuk mencapai penguasaan kompetensi.

Tujuan pembelajaran merupakan fokus utama perubahan perilaku dalam proses penguasaan kompetensi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, keterkaitan antara SKL, KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran sangatlah penting untuk memastikan bahwa RPP tersebut dapat memfasilitasi guru untuk mewujudkan pembelajaran dan belajar otentik serta pada gilirannya dapat ditakar dengan menggunakan penilaian otentik.

A. Kerangka Pembelajaran

Pengembangan desain pembelajaran, harus memperhatikan prinsip-prinsip dan langkah pembuatan kerangka pembelajaran yang mengkaitkan prinsip penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersifat

holistik. Pembelajaran dimulai dari membangun interaksi proses penguasaan pengetahuan dan keterampilan secara interaktif yang berimplikasi pada tumbuhnya dampak pembelajaran yang bersifat afektif.

Keterkaitan antar KD dalam KI-3 dan KI-4 bertujuan untuk menjamin terjadinya proses penguasaan kompetensi pengetahuan dan keterampilan secara utuh yakni pengetahuan yang berbuah keterampilan atau keterampilan yang menghasilkan pengetahuan sebagai wujud dari dampak pembelajaran. Interaksi KI-3 dan KI-4 ini dimaksudkan untuk melahirkan dampak pengiring tumbuhnya sikap spiritual dan sosial dalam diri peserta didik.

Penguasaan pengetahuan diperoleh peserta didik secara langsung dan/atau tidak langsung. Pembelajaran langsung dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu di dalam kelas dan di luar kelas. Jika pembelajaran langsung yang disampaikan di dalam kelas maka pembuatan kerangka pembelajaran harus memperhatikan keterkaitan antara KD dengan KI-3. Tujuannya agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dalam hal ini, peserta didik akan memiliki wawasan pengetahuan yang luas melalui paparan materi yang difasilitasi oleh guru di dalam kelas.

Peserta didik juga diharapkan memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan yang lebih luas dengan mengalaminya secara langsung di lingkungan masyarakat. Untuk itu peserta didik difasilitasi untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara langsung di luar kelas. Untuk mendukung kegiatan tersebut, guru perlu mengembangkan kerangka pembelajaran yang mengkaitkan antara KD dengan KI-4. Tujuannya agar peserta didik dapat mengalami proses belajar melalui kegiatan: mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret. Peserta didik difasilitasi untuk dapat menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak. Selain itu peserta didik juga difasilitasi untuk dapat menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama berdasarkan rasa ingin tahunya. Bidang-bidang yang perlu diketahuinya antara lain tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Peserta didik difasilitasi juga untuk dapat menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya guna memecahkan masalah. Dalam hal ini, peserta didik memperoleh pengetahuan secara langsung dari narasumber yang ada di masyarakat.

Pengembangan kerangka pembelajaran bertujuan juga untuk memfasilitasi pembelajaran secara tidak langsung, sehingga kerangka pembelajaran harus dikelola sedemikian rupa. Proses belajar yang tercipta dari keterkaitan KI-3 dan KI-4 dapat memberikan dampak pengiring (*nurturant effect*) tumbuhnya sikap spiritual yang dimaksud dalam KI-1 dan sikap sosial dalam KI-2. Penguasaan kompetensi KI-3 dan KI-4 serta dampak pengiring sebagaimana dimaksud dalam KI-1 dan KI-2, maka akan tercapai secara utuh kompetensi integrasi KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 (utuh menyeluruh).

Oleh karena PPKn merupakan mata pelajaran yang bermuatan nilai dan moral, dimana kandungan KI-3 dan KI-4 sudah bermuatan nilai dan moral dalam dimensi pengetahuan dan keterampilan, maka pembelajaran langsung KI-3 dan KI-4 secara otomatis akan menjadi dampak pengiring terhadap KI-1 dan KI-2.

Hubungan KD dari KI-3 dan KI-4 dengan KD dari KI-1 dan KI-2 (dimensi sikap spiritual dan sikap sosial) tidaklah linier, artinya tidak selalu berhubungan langsung. Hakikat sikap spiritual dan sosial dalam PPKn adalah kesadaran dan sikap yang terkait pada nilai dan moral kandungan empat pilar kebangsaan yang harus dilihat secara utuh (holistik). Oleh karena itu, dampak pengiring dari KI-3 dan KI-4 tidak selamanya berhubungan langsung dengan setiap pilar kebangsaan secara sendiri-sendiri (parsial). Pengaitan dimensi pengetahuan dan keterampilan dengan dimensi spiritual dan sosial yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan harus dilakukan secara kontekstual sesuai dengan hakikat pengetahuan dan/atau keterampilan itu sendiri. Dalam konteks ini, guru PPKn diharapkan mampu menggunakan seni mengajarnya (*art of teaching*) untuk melakukan pengambilan keputusan *transaksional* (seketika) pada saat pembelajaran berlangsung di kelas.

Pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial tidak terlepas dari penguasaan dimensi pengetahuan dan keterampilan. Secara teoritik tentang teori sikap dijelaskan entitas sikap mempunyai tiga elemen yaitu *cognition* (pengetahuan), *feeling* (perasaan) and *action tendencies* (kecenderungan berbuat). Oleh karena itu, pembentukan sikap harus dimulai dengan penanaman pengetahuan, perasaan dan kecenderungan berbuat, sehingga pada tahap itu keterampilan dapat dilihat.

Pembentukan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2 dapat dilakukan secara tidak langsung sebagai dampak pengiring maupun secara langsung sebagai dampak instruksional yang kedua-duanya dapat dilakukan, baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Melalui pembinaan keterkaitan KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 peserta didik diharapkan dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta memiliki sikap sosial yang berkembang sebagai dampak pengiring dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan.

Keutuhan pembelajaran yang mengembangkan kompetensi yang terkandung dalam KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 diharapkan berdampak terhadap kepribadian peserta didik yang mencerminkan sikap dan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat.

Penanaman nilai sosial pada diri para peserta didik sebagaimana diamanatkan pada KI-2 diharapkan menumbuhkan sikap menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Oleh karena itu, kerangka pembelajaran yang dibuat harus selalu mengkaitkan antara KD dalam KI-1 dan KI-2 dengan KD dalam KI-3 dan KI-4. Dengan demikian, didalam diri peserta didik akan tertanam nilai-nilai seperti; menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum; mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia; mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam

kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akhirnya dalam diri peserta didik akan terinternalisasi (tertanam) nilai-nilai keadaban Pancasila melalui pembentukan karakter baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, pembelajaran guna pembentukan sikap dan penanaman nilai dan moral Pancasila dan pilar kebangsaan lainnya dalam mata pelajaran PPKn diharapkan dapat tercapai.

B. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran yang memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual terhadap sumber nilai, instrumentasi dan fraksis nilai dan moral yang bersumber dari empat pilar kebangsaan. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai variasi kegiatan belajar dan pembelajaran yang menekankan pada hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan rasa keingintahuan (*Foster a sense of wonder*) terkait hal-hal baik yang bersifat empirik maupun konseptual;
- Meningkatkan keterampilan mengamati (*Encourage observation*) dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya yang bersifat kasat mata tetapi juga yang syarat makna;
- Melakukan analisis (*Push for analysis*) untuk mendapatkan keyakinan nilai dan moral yang berujung pada pemilikan karakter tertentu dan
- Berkomunikasi (*Require communication*), baik yang bersifat intrapersonal (berkomunikasi dalam dirinya) / kontemplasi maupun interpersonal mengenai hal yang terpikirkan maupun yang bersifat meta kognitif.

Penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan tersebut diatas secara operasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
<p>Pengamatan (<i>Observing</i>): Guru merancang pembelajaran yang menuntut siswa melakukan pengamatan seperti: pergi ke tempat-tempat bersejarah, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dari obyek yang diamati. Atau mengakses dokumen berbagai sumber dari berbagai cara Dalam tahap ini guru mengarahkan siswa untuk dapat membuat pertanyaan atas obyek yang diamati dan sekaligus dapat membuat item wawancara.</p>	<p>Mengamati (<i>Observing</i>) : Melakukan pengamatan ke tempat-tempat bersejarah dengan observasi dan survey, atau mengakses dokumen berbagai sumber sehingga diperoleh data hasil pengamatan yang dapat merangsang anak untuk mengajukan pertanyaan.</p>
<p>Menanya (<i>Questioning</i>) : Guru memfasilitasi siswa agar berani dan mampu mengajukan berbagai pertanyaan tentang fokus pembelajaran dari berbagai sudut pandang yang berbeda.</p>	<p>Menanya (<i>Questioning</i>) : Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari yang faktual sampai hal yang bersifat hipotetik atas obyek pengamatannya. Pertanyaan tersebut digunakan untuk menggali informasi</p>

	sebanyak-banyaknya.
Pengumpulan Informasi (<i>Experimenting</i>): Guru merancang kegiatan mengumpulkan data atas obyek pengamatannya berupa benda, dokumen, buku, atau melakukan uji coba yang dapat memantu siswa selama proses pembelajaran	Mengumpulkan Informasi (<i>Experimenting</i>): Siswa melakukan pengumpulan data dari sumber berupa benda, dokumen, buku, atau melakukan uji coba dalam konteks tertentu. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara individu atau kelompok di dalam atau di luar kelas yang dimaksudkan untuk rangsangan dalam melakukan proses penalaran
Pengasosiasian (<i>Associating</i>): Guru merancang situasi dan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan kegiatan berbagai proses penalaran dalam rangka menarik kesimpulan dari tingkat sederhana sampai tingkat yang kompleks (pre struktural sampai tingkat abstrak yang diperluas)	Mengasosiasi (<i>Associating</i>) : Siswa melakukan berbagai kegiatan penalaran yang terkait obyek penalaran dengan cara membangun argumen yang jelas berdasarkan data yang diperolehnya dengan penuh tanggungjawab. Dengan difasilitasi guru dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, siswa berusaha untuk mengembangkan pemikiran yang optimal sebagai landasan untuk mengomunikasikan gagasannya dalam konteks yang lebih luas
Mengomunikasikan (<i>Communicating</i>): Guru merancang agar siswa dapat menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya	Mengomunikasikan (<i>Communicating</i>): Melakukan pembuatan laporan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya

C. Strategi dan Metode Pembelajaran

Dalam pembelajaran PPKn perlu dipahami hubungan konseptual dan fungsional strategi serta metode pembelajaran dengan pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan dimaknai sebagai cara menyikapi/melihat (*a way of viewing*). Strategi dimaknai sebagai cara mencapai tujuan dengan sukses (*a way of winning the game* atau *a way of achieving of objectif*). Metode adalah cara menangani sesuatu (*a way of dealing*). Sedangkan teknik dimaknai sebagai cara memperlakukan sesuatu (*a way creating something*). Dilain pihak model adalah kerangka yang berisikan langkah-langkah/urut-urutan kegiatan/sintakmatik yang secara operasional perlu dilakukan oleh guru dan siswa.

Secara umum strategi pembelajaran dalam PPKn yang dimaksudkan untuk memfasilitasi siswa dalam menguasai kompetensi secara utuh (KI-3, KI-4, KI-2, KI-1) secara utuh melalui pembelajaran yang bersifat otentik.

Pembelajaran PPKn dapat menggunakan strategi dan metode yang sudah dikenal selama ini, seperti Jigsaw, *Strategi Reading Guide* (Membaca Buku Ajar), *Information Search* (Mencari Informasi), dan sebagainya. Secara khusus pembelajaran PPKn mengembangkan model pembelajaran yang

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PPKn. Model-model pembelajaran ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab V.

Pada dasarnya tidak ada strategi pembelajaran yang dipandang paling baik, karena setiap strategi pembelajaran saling memiliki keunggulan masing-masing. Strategi pembelajaran yang dinyatakan baik dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu belum tentu baik dan tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lain. Itulah sebabnya, seorang pendidik diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memilih dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran, agar dalam melaksanakan tugasnya dapat memilih alternatif strategi yang dirasakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

D. Rancangan Pembelajaran

Rancangan pembelajaran PPKn harus mengkaitkan antara KI, KD, Indikator, dan tujuan pembelajaran sehingga akan menghasilkan rancangan pembelajaran yang integratif. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

1. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat:

- a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMA LB/SMK/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan);
- b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
- c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan matapelajaran;
- d. Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran; Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A);
- e. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
- f. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
- g. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
- h. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
- i. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtemayang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

a. Komponen RPP terdiri atas:

- 1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan
- 2) identitas matapelajaran atau tema/sub tema;
- 3) kelas/semester;
- 4) materi pembelajaran;
- 5) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
- 6) kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- 7) deskripsi materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- 8) Kegiatan Pembelajaran
- 9) Penilaian
- 10) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- 11) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;

b. Prinsip Penyusunan RPP

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Setiap RPP harus memuat secara utuh memuat kompetensi sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
- 2) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali atau lebih dari satu kali pertemuan.
- 3) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- 4) Berpusat pada peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan

- pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan.
- 5) Mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
 - 6) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
 - 7) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
 - 8) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB V MODEL PEMBELAJARAN

A. Macam-Macam Model Pembelajaran PPKn

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*Discovery/Inquiry Learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*Project-Based Learning*).

Pembelajaran *Discovery Learning* mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (*inquiry*) dan *Problem Solving*. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, pada *Discovery Learning* lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan *Discovery* ialah bahwa pada *Discovery* masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Model Pembelajaran dalam mata Pelajaran PPKn yang sesuai dengan pembelajaran berbasis *Discovery* antara lain Pembiasaan, Keteladanan, Bekerja dalam kelompok, Mendengarkan penuh perhatian, Bertanya mendalam/Dialektis, Memanfaatkan TIK, Berdiskusi peristiwa publik, Pelacakan isu dalam Media Massa, Meneliti isu Publik, Menulis gagasan, Mengklarifikasi nilai, Pembelajaran berbasis budaya, Kajian dokumen historis, Latihan bermusyawarah, Penyajian/Presentasi Gagasan, Berlatih empati/toleransi, Kajian konstitusional, Dialog mendalam dan berfikir kritis, Refleksi nilai-nilai luhur, Kajian komparasi gagasan.

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning=PjBL*) adalah metoda pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. Model Pembelajaran dalam Mata Pelajaran PPKn yang sesuai dengan pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning=PjBL*) antara lain Penciptaan suasana Lingkungan, Partisipasi dalam asosiasi, Membangun koalisi, Mengelola konflik, Pengabdian kepada Masyarakat, Menghadiri pertemuan/dengar pendapat, Mewawancarai narasumber, Melaksanakan pemilihan, Melakukan loby/pendekatan, Mengajukan usul/petisi, Menuliskan gagasan, Berbicara di depan publik, Debat Pro-kontra, Partisipasi kewarganegaran, Proyek belajar kewarganegaraan, Bermain/Simulasi, Kajian karakter ketokohan, Kajian kearifan lokal, Berlatih demonstrasi damai, Kunjungan lapangan, Menulis biografi tokoh.

Merujuk pada desain pembelajaran yang sudah dikemukakan pada bab IV, berikut ini disajikan berbagai model pembelajaran mata pelajaran PPKn sebagai berikut:

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
1.	Pembiasaan	Penugasan dan pemantauan pelaksanaan sikap dan/atau perilaku kewargaan (sekolah/masyarakat/ negara) yang baik oleh peserta didik.
2.	Keteladanan	Penampilan sikap dan/atau perilaku kewargaan (sekolah/masyarakat/ warga negara) yang baik dari seluruh unsur manajemen sekolah dan guru.
3.	Penciptaan suasana Lingkungan	Penataan lingkungan kelas/sekolah dengan kelengkapan simbol-simbol kemasyarakatan/ kenegaraan, antara lain Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Foto Presiden dan Wakil Presiden.
4.	Bekerja dalam Kelompok	Dengan penugasan guru, peserta didik mengerjakan tugas tertentu terkait hak dan kewajiban sebagai warga sekolah/masyarakat/ negara atau materi lainnya dalam kelompok kecil (3 – 5 orang).
5	Mendengarkan Penuh Perhatian	Peserta didik secara bersama diminta menyimak rekaman pidato atau penjelasan seseorang, dan mencatat pokok-pokok pikiran dari pembicara
6,	Bertanya Mendalam/ Dialektis	Peserta didik secara berpasangan berlatih menggunakan keterampilan bertanya tentang suatu hal/isu secara bergiliran sebagai yang bertanya dan yang menjawab sampai diperoleh jawaban final.
7.	Berdiskusi Peristiwa Publik	Peserta didik secara perseorangan diminta mengangkat suatu peristiwa yang sangat aktual di lingkungannya, kemudian difasilitasi untuk menetapkan satu peristiwa untuk didiskusikan secara kelompok (3 – 5 orang)
8.	Partisipasi dalam Asosiasi	Peserta didik difasilitasi untuk membentuk klub-klub di sekolahnya, misalnya klub pencinta alam, penyayang binatang, penjaga kelestarian lingkungan, dll
9.	Membangun Koalisi	Peserta didik difasilitasi untuk bekerjasama antar klub untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya untuk penghijauan lingkungan sekolahnya.
10.	Mengelola Konflik	Peserta didik berlatih menengahi suatu konflik antar siswa di sekolahnya melalui bermain peran sebagai pihak yang terlibat konflik dan yang menjadi mediator konflik secara bergantian, dengan menerapkan mediasi konflik yang cocok.
11.	Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	Secara berkala peserta didik difasilitasi untuk mengadakan kerjabakti membantu masyarakat sekitar dalam menanggulangi

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
		masalah sosial terkait kejadian atau bencana tertentu, sebagai kegiatan kemanusiaan.
12.	Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peserta didik difasilitasi/ ditugasi untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu dari jaringan internet.
13.	Pelacakan Isu dalam Media Massa	Peserta didik secara berkelompok ditugasi untuk melacak berita yang berisi masalah pelik dalam masyarakat cara menghimpun kliping beberap koran lokal dan/ atau lokal.
14.	Meneliti Isu Publik	Guru menyiapkan beberapa isu publik yang muncul atau berkembang suatu waktu. Selanjutnya dipilih satu isu publik untuk dikaji secara kelompok tentang latar belakang dan kejelasan isu itu, serta memberikan klarifikasi yang cukup dapat dipahami orang lain.
15.	Menghadiri Pertemuan/Dengar Pendapat	Peserta didik diminta untuk menghadiri suatu pertemuan yang diadakan dilingkungannya, yang sebelumnya dikoordinasikan oleh guru. Masing-masing peserta didik diminta untuk menuliskan laporan singkat tentang pertemuan tersebut
16.	Mewawancarai Nara Sumber	Guru menugasi peserta didik secara perseorangan untuk melakukan wawancara dengan pejabat setempat (Ketua RT/RW/ Lurah/Camat, mencatat inti wawancara, dan menyusun laporan singkat hasil wawancara tersebut
17.	Melaksanakan Pemilihan	Peserta didik difasilitasi untuk merencanakan dan melaksanakan pemilihan panitia karyawisata kelas atau pemilihan ketua kelas/ketua OSIS sekolah.
18.	Melakukan Lobby/Pendekatan	Diadakan simulasi lobby/pendekatan seorang tokoh masyarakat kepada birokrasi lokal untuk menyampaikan suatu usulan perbaikan sarana umum di lingkungannya yang memerlukan bantuan biaya dari pejabat setempat.
19.	Mengajukan Usul/Petisi	Diadakan simulasi menyusun usulan/petisi dari masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh pemerintah setempat yang akan membuat jalan melewati tanah miliknya tanpa ganti rugi yang memadai. Petisi disampaikan secara damai.
20.	Menuliskan Gagasan	Masing-masing peserta didik diminta untuk menyiapkan suatu gagasan perbaikan lingkungan dan menuliskannya dalam bentuk usulan kegiatan.
21.	Berbicara di Depan Publik	Secara perseorangan peserta didik difasilitasi untuk menyampaikan sebuah

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
		pidato singkat sebagai generasi muda yang mencintai budaya setempat untuk dilestarikan dalam memperkaya budaya nasional Indonesia.
22.	Debat Pro-Kontra	Dipilih suatu kebijakan publik (riil atau fiktif) yang mengundang pandangan pro dan kontra. Setiap kelompok siswa (2-3 orang) diprogram untuk masing-masing berperan sebagai kelompok yang pro atau yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Seting debat dipimpin oleh guru atau peserta didik sebagai moderator. Dengan cara itu diharapkan terbiasa berargumentasi secara rasional dan elegan.
23.	Partisipasi Kewarganegaraan	Setiap peserta didik ditugasi untuk ikut serta dalam suatu kegiatan sosial-Budaya di lingkungannya, dan membuat catatan apa kegiatan itu dan apa sumbangannya dalam kegiatan tersebut.
24.	Projek Belajar Kewarganegaraan	Secara klasikal peserta didik difasilitasi untuk merancang dan mengembangkan kegiatan pemecahan masalah terkait kebijakan publik dengan menerapkan langkah-langkah: pemilihan masalah, pemilihan alternatif kebijakan publik, pengumpulan data dan penyusunan portofolio, dan diakhiri dengan simulasi dengar pendapat dengan pejabat terkait.
25.	Mengklarifikasi Nilai	Peserta didik difasilitasi secara dialogis untuk mengkaji suatu isu nilai, mengambil posisi terkait nilai itu, dan menjelaskan mengapa ia memilih posisi nilai itu
26.	Bermain/Simulasi	Guru menentukan tema/bentuk permainan/ simulasi yang menyentuh satu atau lebih dari satu nilai dan/atau moral Pancasila. Peserta didik difasilitasi untuk bermain/ bersimulasi terkait nilai dan/atau moral Pancasila, yang diakhiri dengan refleksi penguatan nilai dan/atau moral tersebut.
27.	Pembelajaran Berbasis Budaya	Guru menggunakan unsur kebudayaan, seperti seni seperti lagu daerah; alat seperti benda cagar budaya, dll untuk mengantarkan nilai dan/ atau moral; atau guru melibatkan peserta didik untuk melakukan peristiwa budaya seperti lomba baca puisi perjuangan, pentas seni Bhinneka Tunggal Ika.
28.	Kajian Dokumen Historis	Peserta didik difasilitasi untuk mencari/ menggunakan dokumen historis keindonesiaan sebagai wahana pemahaman konteks lahirnya suatu gagasan/ ketentuan/peristiwa sejarah, dll dan

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
		menumbuhkan kesadaran akan masa lalu terkait masa kini.
29.	Kajian Karakter Ketokohan	Peserta didik difasilitasi mencari dan memilih satu tokoh dalam masyarakat dalam bidang apa saja; menemukan karakter dari tokoh tersebut; menjelaskan mengapa tokoh tersebut itu menjadi idolanya.
30.	Kajian Kearifan Lokal	Peserta didik dikasilitasi untuk menggali kearifan lokal yang secara sosial-Budayaal masih diterima sebagai suatu nilai/moral/kebaikan yang memberi maslahat dalam kehidupan saat ini.
31.	Latihan Bermusyawarah	Peserta didik difasilitasi untuk berlatih mengambil keputusan bersama secara musyawarah untuk mufakat, dan memberi alasan mengapa musyawarah itu diperlukan.
32.	Penyajian/ Presentasi Gagasan	Secara bergiliran setiap peserta didik diminta untuk mempersiapkan dan melaksanakan sajian lisan tanpa atau dengan menggunakan media tentang sesuatu hal yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada publik.
33.	Berlatih Demonstrasi Damai	Guru menskenarionakan adanya kebijakan publik yang merugikan hajat hidup orang banyak, misalnya penguasaan aset negara oleh orang asing, Kemudian peserta didik difasilitasi secara kelompok untuk melakukan demonstrasi damai kepada pihak pemerintah pusat.
34.	Berlatih Empati dan Toleransi	Guru mengangkat suatu kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, ketertinggalan, kebodohan. Peserta didik difasilitasi secara kelompok untuk menyepakati langkah atau kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk membantu meringankan masalah itu, disertai alasan mengapa perlu melakukan hal tersebut.
35.	Kajian Konstitusionalitas	Peserta didik difasilitasi untuk mencari ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundangan dibawahnya mengenai materi pokok, suatu peristiwa/kasus yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, misalnya pejabat setempat yang menerima uang suap. Secara berkelompok peserta didik diminta untuk menguji konstitusionalitas (kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada) dengan diskusi mendalam dengan penuh argumentasi.
36.	Kunjungan	Secara berkala peserta didik diprogramkan

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
	Lapangan	untuk melakukan kunjungan lapangan ke situs-situs /tempat/pusat kewarganegaraan, seperti lembaga publik/birokrasi guna membangkitkan kesadaran dan kepekaan terhadap masalah di lingkungan masyarakatnya.
37.	Dialog Mendalam dan Berpikir Kritis	Peserta didik difasilitasi untuk secara perseorangan dan kelompok mencari dan menemukan persoalan yang pelik/kompleks dalam masyarakat, seperti konflik horizontal yang tengah terjadi dalam masyarakat Kemudian secara berkelompok (3-5 orang) ditugasi untuk mengkajinya secara mendalam dan kritis guna menemukan alternatif solusi terhadap masalah tersebut.
38.	Menulis Biografi Tokoh	Setiap peserta didik diminta untuk mencari dan memilih seorang yang paling ia kagumi/hormati di lingkungannya untuk kemudian disusun biografi/riwayat kehidupannya secara singkat. Mintakan pula hal-hal yang paling penting berharga untuk diteladani dari tokoh tersebut.
39.	Refleksi Nilai-Nilai Luhur	Secara selektif guru membuat daftar nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini dilupakan atau dilecehkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara klasikal guru memfasilitasi curah pendapat mengapa hal itu terjadi. Selanjutnya setiap kelompok peserta didik (2-3) orang menggali apa kandungan nilai/moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
40.	Kajian Komparasi Gagasan	Guru menyiapkan sejumlah sumber belajar yang memuat berbagai gagasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi ikon dari masing-masing aliran/kelompok/tradisi. Peserta didik secara berkelompok (3 – 5 orang) untuk mencari kesamaan dan perbedaan dari dua gagasan atau lebih yang dianalisisnya.

B. Pemilihan Model

Pemilihan model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan pembelajaran dan sifat materi pelajaran apakah materi itu termasuk ranah sikap, pengetahuan atau keterampilan.
2. Karakteristik kemampuan peserta didik misalnya kemampuan membaca, motivasi dalam belajar, kemampuan dalam penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
3. Alokasi waktu yang tersedia
4. Sumber belajar dan media pembelajaran yang tersedia.

5. Ketersediaan fasilitas/ sarana dan prasarana seperti kondisi ruang kelas, fasilitas perpustakaan, akses internet.

Berdasarkan model-model pembelajaran yang di sajikan diatas maka alternatif pemilihan model pembelajaran berdasarkan ranah kompetensi adalah sebagai berikut:

NO	RANAH KOMPETENSI	MODEL PEMBELAJARAN
1.	Sikap	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiasaan b. Keteladanan c. Berlatih empati d. Refleksi nilai-nilai luhur e. Mengklarifikasi Nilai f. Membangun koalisi g. Mengelola konflik h. Pengabdian Kepada masyarakat i. Proyek belajar kewarganegaraan j. Bermain / simulasi k. Pembelajaran berbasis budaya l. Kajian karakter ketokohan m. Kajian kearifan local n. Berlatih demonstrasi damai
2.	Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendengar dengan penuh perhatian b. Berdiskusi peristiwa public c. Memanfaatkan Teknologi informatika & Komunikasi (TIK) d. Pelacakan Isu Media massa e. Meneliti Isu Publik f. Menghadiri Pertemuan/dengar pendapat g. Melaksanakan pemilihan h. Mengajukan usul/petisi i. Menuliskan gagasan j. Berbicara di depan public k. Kajian Dokumen Historis l. Penyajian/presentasi gagasan m. Kajian Konstitusionalitas n. Dialog Mendalam dan berfikir kritis o. Kajian Komparasi Gagasan
3.	Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bekerja dalam kelompok b. Mendengarkan dengan penuh perhatian c. Bertanya Mendalam/ Dialektis d. Partisipasi dalam asosiasi e. Membangun Koalisi f. Mengelola konflik g. Pengabdian kepada masyarakat h. Mewawancarai Narasumber i. Melaksanakan pemilihan j. Melakukan loby/pendekatan k. Debat Pro – Kontra l. Partisipasi Kewarganegaraan m. Dialog mendalam dan berfikir kritis

C. Keterkaitan Materi dan Model Pembelajaran

Pemilihan model pembelajaran ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Model pembelajaran yang digunakan hendaknya memperhatikan identifikasi materi yaitu tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam Kompetensi Dasar, misalnya tingkatan Pengetahuan “memahami” berbeda dengan tingkatan Pengetahuan “menganalisa” dalam pemilihan model pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan materi sesuai dengan ranah sikap, pengetahuan atau keterampilan. Contoh model pembelajaran “memahami nilai-nilai Pancasila” berbeda dengan model pembelajaran untuk “menganalisis nilai-nilai Pancasila”.

Selain model pembelajaran sebagaimana diuraikan diatas, guru boleh menggunakan model/metode pembelajaran yang sudah biasa di gunakan selama ini seperti diskusi, Jigsaw, Tanya jawab, Ceramah bervariasi dengan tetap bermuatan Pendekatan Scientific.

Contoh keterkaitan materi dengan model pembelajaran

Kelas VII

KD	MATERI	MODEL PEMBELAJARAN
3.1 Memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara	Sejarah Perumusan Pancasila sebagai dasar negara	1. Kajian Dokumen Historis
4.1 Menyaji hasil telaah tentang “sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara”		2. Kajian Karakter Ketokohan Peserta didik difasilitasi untuk mencari dan membaca sejarah perumusan pancasila, kemudian memilih salah satu tokoh perumusan dasar Negara dan menemukan karakter dari tokoh tersebut; menjelaskan mengapa tokoh tersebut itu menjadi idolanya

Contoh keterkaitan materi dengan model pembelajaran

Kelas X

KD	MATERI	MODEL PEMBELAJARAN
<p>3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>	<p>Kasus-kasus pelanggaran HAM</p>	<p>1. Berdiskusi Peristiwa Publik</p> <p>2. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).</p> <p>Peserta didik ditugasi untuk mencari berbagai kasus pelanggaran HAM dalam internet/media massa dan mendiskusikan dalam kelompok kecil (3- 5 orang) dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas)</p>

BAB VI PENILAIAN

A. Strategi Dasar Penilaian PPKn

1. Pengertian Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik; Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Berdasarkan pada PP. Nomor 32 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan fungsi penilaian hasil belajar, adalah sebagai berikut :

- a. Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas.
- b. Umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar.
- c. Meningkatkan motivasi belajar siswa.
- d. Evaluasi diri terhadap kinerja siswa

Permendikbud tentang Standar Penilaian menegaskan bahwa penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.

2. Pendekatan Penilaian

a. Penilaian Otentik

Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.

Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Beberapa karakteristik penilaian otentik sebagai berikut :

- (1) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan terpisah dari proses pembelajaran.
- (2) Penilaian mencerminkan hasil proses pembelajaran pada kehidupan nyata, tidak berdasarkan pada kondisi yang ada di sekolah.
- (3) Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar.
- (4) Penilaian bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (5) Penilaian mencakup penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar.

b. Penilaian Acuan Kriteria (PAK)

PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Sejalan dengan ini maka guru didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tuntas (*mastery learning*) serta tidak berorientasi pada pencapaian target kurikulum semata

3. Prinsip-Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standardan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.
- b. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.
- c. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.
- d. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.
- e. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.
- f. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.

B. Teknik dan Bentuk Penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan

1. Penilaian Sikap

Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu *sikap spiritual* yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan *sikap sosial* yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat”(peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

- a. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi menggunakan daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik.
- b. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik.
- c. Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan

pencapaian kompetensi sikap tertentu. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik menggunakan daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik. Instrumen teknik ini pada dasarnya sama dengan teknik penilaian diri, namun diisi oleh teman. Oleh karena itu lembar penilaian antarpeserta didik dapat menggunakan lembar penilaian penilaian diri.

- d. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Sikap sosial dan spritual yang nampak pada diri peserta didiki diamati dan dicatat dalam lembar jurnal. Bentuk format lemar jurnal dapat dibuat berdasarkan peserta didik secara individu atau waktu muncul sikap.

2. Penilaian Pengetahuan

Kompetensi pengetahuan merupakan kompetensi ranah kognitif dalam taksonomi pendidikan. Perkembangan pencapaian kompetensi pengetahuan melalui tahapan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Gradasi pencapaian kompetensi pengetahuan PPKn pada jenjang SD/MI adalah mengingat, SMP/MTs adalah memahami dan menerapkan, dan SMA/MA/SMK/MAK adalah memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Tahapan ini perlu dipahami guru dalam menyusun indikator pencapaian komtensi dalam meyusun kisi-kisi penilaian.

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui teknik tes tulis, tes lisan, dan penugasan.

- a. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.

(1) Pilihan Ganda

Soal pilihan ganda secara umum terdiri atas pertanyaan dan alternatif pilihan jawaban. Bentuk penilaian ini lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan.

(2) Isian

Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal yang jawabannya menuntut siswa untuk melengkapi atau mengisi kata-kata atau kelompok kata yang dihilangkan. Soalnya disusun seperti kalimat lengkap, kemudian dihilangkan pada bagian tertentu yang harus diisi oleh siswa. Bentuk penilaian ini lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan.

(3) Jawaban Singkat

Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal obyektif yang jawabannya menuntut siswa menjawab soal dengan singkat yaitu jawabannya dapat berupa satu kata, kelompk kata / frase, simbol matematika, atau angka. Bentuk penilaian ini lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan.

(4) Benar Salah

Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal obyektif yang setiap soalnya terdapat dua macam kemungkinan jawaban yang berlawanan yaitu *benar* atau *salah*. Bentuk soal benar-salah biasanya dipergunakan untuk menanyakan fakta, ide, dan konsepsi yang kompleks. Bentuk penilaian ini lebih tepat

digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan.

(5) Menjodohkan

Bentuk ini wujudnya terdiri dari dua kelompok atau kolom. Tugas siswa adalah mencari pasangan yang tepat dalam dua kelompok itu. Biasanya bentuk menjodohkan hanya terbatas untuk mengukur kemampuan ingatan.

(6) Uraian

Soal uraian adalah soal yang menuntut jawaban peserta tes dengan mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang dipelajari dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan.

Soal uraian dibagi atas uraian terstruktur dan uraian tidak terstruktur. Soal uraian terstruktur memiliki jawaban yang terbatas dan jelas. Sedangkan uraian tidak terstruktur memiliki jawaban yang sangat variatif.

Bentuk soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah dan menjodohkan, lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan. Sedangkan saat ulangan harian lebih tepat menggunakan soal uraian, sehingga dapat mengembangkan berpikir divergen (beragam).

b. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.

Tes lisan adalah tes yang pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes lisan dapat dilaksanakan dengan menggunakan pedoman pertanyaan atau tanpa pedoman pertanyaan.

c. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

Penugasan yang bertujuan untuk mencapai kompetensi pengetahuan antara lain membuat klipng, mencari data, wawancara, merangkum, kajian tokoh, kajian historis, dan menulis gagasan,

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Perkembangan pencapaian kompetensi keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Gradasi pencapaian kompetensi keterampilan mata pelajaran PPKn pada jenjang SD/MI adalah mengamati dan menanya, SMP/MTs adalah mencoba (interaksi dan partisipasi kewarganegaraan), menyaji, dan menalar, sedangkan jenjang SMA/MA/SMK/MAK adalah mencoba dan menyajikan. Tahapan ini perlu dipahami oleh guru untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam kisi-kisi penilaian.

Teknik penilaian kompetensi keterampilan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

a. Tes Praktik

Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan

tuntutan kompetensi. Tes praktik dalam pembelajaran PPKn antara lain melalui simulasi, tes perbuatan, sosiodrama.

b. **Projek**

Penugasan projek adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu diluar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Projek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu umumnya menggunakan data. Penilaian projek mencakup penilaian proses dan hasil belajar. Penugasan projek dalam PPKn antara lain melalui projek belajar kewarganegaraan. Penilaian projek belajar kewarganegaraan dilaksanakan pada setiap langkah kegiatan mulai dari identifikasi masalah sampai dengan penyajian. Penilaian meliputi penilaian proses dan hasil dari kegiatan ini. Penilaian proses antara lain mencakup persiapan, kerja sama, partisipasi, koordinasi, aktifitas, dan yang lain dalam penyusunan maupun dalam presentasi hasil kerja. Sedangkan penilaian hasil mencakup dokumen laporan dan presentasi laporan.

c. **Portofolio**

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Penilaian portofolio dapat dilakukan saat menerapkan model pembelajaran pengabdian masyarakat, partisipasi kewarganegaraan, mengajukan usul/petisi, partisipasi dalam asosiasi, membangun koalisi, mengelola konflik, berlatih empati dan toleransi, kunjungan lapangan dan model pembelajaran yang lain.

Penilaian portofolio dapat dilakukan untuk menilai kompetensi dasar tentang berinteraksi dengan teman dan menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan. Kedua kompetensi dasar ini merupakan praktik kewarganegaraan yang dapat dilaksanakan pada setiap materi pembelajaran.

C. Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Hasil Belajar

1. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian otentik merupakan prinsip utama dalam standar penilaian Kurikulum 2013. Sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian otentik maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian adalah :

a. Pelaksanaan penilaian oleh guru mencakup ulangan harian, penilaian projek, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester.

a. Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. Ulangan dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu materi pembelajaran atau sub materi pembelajaran pada kegiatan penutup proses pembelajaran. Penilaian projek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

- b. Penilaian mencakup penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses menilai perkembangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil belajar dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan penilaian proses dan hasil belajar.
- c. Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.
- d. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan/atau nontes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik

2. Pelaporan Pencapaian Kompetensi Peserta Didik

a. Skor dan Nilai

Penilaian kompetensi hasil belajar mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan dapat secara terpisah tetapi dapat juga melalui suatu kegiatan atau peristiwa penilaian dengan instrumen penilaian yang sama.

Untuk masing-masing ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda.

Tabel Konversi Skor dan Predikat Hasil Belajar untuk Setiap Ranah

Sikap		Pengetahuan		Keterampilan	
Skor Modus	Predikat	Skor Rerata	Predikat	Skor Optimum	Predikat
4,00	SB (Sangat Baik)	$3,83 > x \geq 4,00$	A	$3,83 > x \geq 4,00$	A
		$3,50 > x \geq 3,83$	A-	$3,50 > x \geq 3,83$	A-
3,00	B (Baik)	$3,17 > x \geq 3,50$	B+	$3,17 > x \geq 3,50$	B+
		$2,83 > x \geq 3,17$	B	$2,83 > x \geq 3,17$	B
		$2,50 > x \geq 2,83$	B-	$2,50 > x \geq 2,83$	B-
2,00	C (Cukup)	$2,17 > x \geq 2,50$	C+	$2,17 > x \geq 2,50$	C+
		$1,83 > x \geq 2,17$	C	$1,83 > x \geq 2,17$	C
		$1,50 > x \geq 1,83$	C-	$1,50 > x \geq 1,83$	C-
1,00	K (Kurang)	$1,17 > x \geq 1,50$	D+	$1,17 > x \geq 1,50$	D+
		$1,00 > x \geq 1,17$	D	$1,00 > x \geq 1,17$	D

Nilai akhir yang diperoleh untuk ranah sikap diambil dari nilai modus (nilai yang terbanyak muncul). Nilai akhir untuk ranah pengetahuan diambil dari nilai rerata. Nilai akhir untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal (nilai tertinggi yang dicapai).

b. Bentuk Laporan

Laporan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam bentuk sebagai berikut.

1) Pelaporan oleh Pendidik

Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk laporan hasil ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester.

2) Pelaporan oleh Satuan Pendidikan

Rapor yang disampaikan oleh pendidik kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali). Buku rapor memuat laporan tentang:

- a) hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;
- b) pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait;
- c) hasil ujian Tingkat Kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan dinas pendidikan.

c. Nilai Untuk Rapor

Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor berupa:

- 1) untuk ranah sikap menggunakan skor modus 1,00 – 4,00 dengan predikat Kurang (K), Cukup (C), Baik (B), dan Sangat Baik (SB);
- 2) untuk ranah pengetahuan menggunakan skor rerata 1,00 – 4,00 dengan predikat D – A.
- 3) untuk ranah keterampilan menggunakan skor optimum 1,00 – 4,00 dengan predikat D – A.

Contoh deskripsi kompetensi pengetahuan dan keterampilan :

- “Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memahami Sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, dan perlu ditingkatkan dalam memahami karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI”
- “Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan tulisan sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, dan perlu ditingkatkan dalam menyajikan isi Pembukaan UUD 1945 dan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI”

a. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. Laporan nilai sikap oleh pendidik berupa nilai secara kualitatif dan deskripsi kompetensi sikap peserta didik. Sedangkan wali kelas menyusun deskripsi nilai sikap antar mata pelajaran dengan terlebih dahulu diskusi dengan guru mata pelajaran dan guru lain.

(1) Nilai kualitatif menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu :

- Sangat baik (SB)

- Baik (B),
 - Cukup (C),
 - Kurang (K).
- (2) Deskripsi sikap memuat uraian secara naratif pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran . Deskripsi sikap pada setiap mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik, dan sikap yang masih perlu ditingkatkan. Contoh uraian deskripsi sikap dalam mata pelajaran antara lain :
- Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, perlu ditingkatkan sikap percaya diri
 - Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, dan percaya diri
- (3) Deskripsi sikap antarmata pelajaran menjadi tanggung jawab wali kelas melalui analisis nilai sikap setiap mata pelajaran dan proses diskusi secara periodik dengan guru mata pelajaran. Deskripsi sikap antarmata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik, dan sikap yang masih perlu ditingkatkan apabila ada secara keseluruhan, serta rekomendasi untuk peningkatan. Contoh uraian deskripsi sikap antarmata pelajaran antara lain :
- Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Perlu ditingkatkan sikap tanggung jawab, melalui pembiasaan penugasan mandiri di rumah
- b. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) pada periode yang ditentukan

BAB VII MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

A. Media Belajar PPKn

Media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media sebagai alat komunikasi merupakan segala sesuatu yang membawa informasi (pesan) dari sumber informasi kepada penerima informasi. Oleh sebab itu media pembelajaran merupakan segala wujud yang tepat dipakai sebagai sumber belajar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran ke tingkat lebih efektif dan efisien.

Media Pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam membantu tercapainya proses pembelajaran, bahkan dapat dikatakan sebagai “Dunia Media”, ada kekhawatiran dapat menggeser fungsi guru dalam proses pembelajaran.

Pada dasarnya proses pembelajaran sama dengan proses komunikasi atau proses informasi yaitu proses menerima, menyimpan dan mengungkap kembali informasi. Dalam proses pembelajaran pesan tersebut berupa materi pelajaran, sumber diperankan oleh guru, saluran pesan berupa pembelajaran dan penerima pesan adalah peserta didik, sedangkan hasilnya adalah bertambahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Selama proses belajar, peserta didik mengalami 3 (tiga) proses informasi yaitu:

- a. *Proses menerima* yang terjadi pada saat peserta didik menerima pelajaran. Pada saat inilah diperlukan banyak media pembelajaran yang dapat menyalurkan pesan-pesan materi pelajaran.
- b. *Proses menyimpan* informasi terjadi pada saat peserta didik harus menghafal, memahami, mencerna isi materi pelajaran. Penyimpanan informasi dapat bertahan lama bila pesan yang ditampilkan melalui media pada saat menerima informasi memiliki kesan mendalam dalam diri peserta didik.
- c. *Proses mengungkapkembali* informasi terjadi pada saat peserta didik mengikut ulangan atau ujian atau pada saat peserta didik harus menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.

Sering dijumpai permasalahan atau kesulitan dalam proses komunikasi misalnya:

- a. *Ditinjau dari pihak peserta didik* ada kesulitan bahasa, sulit menghafal, sulit menerima pelajaran, tidak tertarik pada materi yang dipelajari, kesulitan mengungkap kembali dan ada gangguan panca indera.
- b. *Ditinjau dari guru*, tidak kesulitan mahir mengemas materi, kesulitan menyajikan materi, kelelahan karena banyaknya mengajar. Bahkan adanya kesulitan mengemas proses pembelajaran akibat keberagaman peserta didik secara psikologis misalnya ada anak anditiv, visual, audio visual maupun kinestetik dalam satu kelas.
- c. *Ditinjau dari pesan atau materi yang dibelajarkan*, ada materi yang terlalu jauh dari tempat siswa, jauh dari pengalaman peserta didik, materi terlalu besar atau terlalu kecil atau terlalu abstrak.

Idealnya, selama proses pembelajaran, dapat memberikan pengalaman langsung yang nyata kepada peserta didik. Namun karena keadaan, tidak semua materi dapat diberikan pengalaman secara nyata. Oleh sebab itu, digunakan pengalaman tiruan yang didramatisasikan sesuai standar penampilan dan standar isi/materi pembelajaran, agar kemampuan yang

diharapkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (keterampilan intelektual, posisi diri dan partisipasi) dapat dibelajarkan dengan optimal serta dengan menggunakan media pembelajaran.

1. Media Pembelajaran Dan Pengalaman Belajar

Mengalami langsung apa yang sedang dipelajari akan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan orang lain/guru menjelaskan. Membangun pemahaman dari pengalaman langsung akan lebih mudah dari pada membangun pemahaman dari uraian lisan guru apalagi bila peserta didik berada pada tingkat berpikir konkrit.

Pada dasarnya semua peserta didik memiliki potensi untuk mencapai kompetensi. Kalau sampai mereka tidak mencapai kompetensi bukan lantaran mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu tetapi lebih banyak akibat mereka tidak disediakan pengalaman belajar yang relevan dengan keunikan masing-masing peserta didik secara individual. Meskipun setiap peserta didik mempunyai keunikan atau karakteristik masing-masing namun mereka juga mempunyai kesamaan (Depdiknas; 2003:12) yaitu:

- a. Sikap ingin tahun (*curiosity*)
- b. Sikap kreatif (*creativity*)
- c. Sikap sebagai pelajar aktif (*active learner*)
- d. Sikap sebagai pengambil keputusan (*decision maker*)

Secara umum, mungkin sebagian peserta didik saja yang dapat memperoleh pengalaman belajar. Supaya semua peserta didik mengalami peristiwa belajar maka perlu menyediakan berbagai ragam pengalaman belajar (Depdiknas, 2003:12-14) yaitu.

a. Pengalaman mental

Pengalaman mental dapat diperoleh melalui membaca, mendengarkan (ceramah, berita radio) melakukan pere-nungan, menonton (televisi, pertunjukan, film). Biasanya peserta didik hanya memperoleh informasi melalui indera dengar dan lihat. Pengalaman belajar melalui indera dengar lebih sulit dari pada indera lihat karena melalui indera dengar diperlukan kemampuan abstraksi dan konsentrasi.

b. Pengalaman fisik

Pengalaman belajar ini meliputi kegiatan pengamatan percobaan, penelitian, kunjungan, karyawisata/widyawisata, dan kegiatan praktis lainnya. Dalam pengalaman belajar ini peserta didik dapat memanfaatkan seluruh inderanya ketika menggali informasi.

c. Pengalaman Sosial

Pengalaman sosial yang dapat dilakukan adalah melakukan wawancara dengan tokoh, bermain peran, berdiskusi, bekerja sama, bekerja bakti, melakukan bazar pameran, jual beli, pengumpulan dan untuk bencana alam atau ikut arisan. Pengalaman belajar ini akan bermanfaat bila masing-masing peserta didik diberikan peluang untuk berinteraksi misalnya saling bertanya, menjawab, berkomentar, mempertanyakan jawaban, mendemonstrasikan.

Belajar merupakan proses membangun gagasan/pemahaman sendiri, maka kegiatan pembelajaran harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat, berpikir, berinteraksi, bermotivasi tanpa hambatan guru. Suasana belajar hendaknya memberikan peluang untuk melibatkan mental secara aktif melalui beragam kegiatan. Oleh sebab itu dalam merumuskan pengalaman belajar perlu memprioritaskan situasi nyata. Kalau sulit sediakan situasi buatan

(simulasi, demonstrasi, audio visual, visual dan cara dengan pola audio), ceramah baru dipilih setelah semuanya tidak bisa dilaksanakan).

Berkaitan dengan sudut pandang konkrit dan abstrak maka pengalaman belajar dapat diklarifikasikan menjadi 5 (lima) macam (Depdiknas, 2003:15-18) yaitu:

a. Situasi nyata.

Ada dua situasi nyata dalam pengalaman belajar ini yaitu *keterlibatan peserta didik cara langsung* (ikut serta, terlibat) dalam suatu kegiatan misalnya ikut kerja bakti, ikut mencari sumbangan bencana alam, dan *keterlibatan peserta didik hanya sebagai pengamat* (tidak terlibat langsung) misalnya melakukan pengamatan terhadap jalannya sidang di pengadilan. Beberapa kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan praktis akan lebih efektif kalau dilaksanakan dengan menghadirkan atau mendatangi situasi dan peristiwa nyata.

b. Situasi buatan

Kegiatan pembelajaran tidak selalu mampu memberikan pengalaman nyata atau situasi nyata. Mungkin akibat dana, waktu, jarak dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu melakukan kegiatan simulasi yakni membuat situasi buatan, dimana kondisi kelas dirancang untuk simulasi dan peserta didik sebagai simulator (terlibat langsung) maupun sebagai pengamat (tidak terlibat langsung).

c. Audio Visual

Audio visual menyajikan contoh situasi nyata atau contoh situasi buatan dalam sajian tayangan hidup (film). Cara ini lebih mudah menjadi pengalaman belajar kalau sajian tayangannya mengandung unsur yang berkaitan dengan pengalaman dan imajinasi peserta didik. Pencapaian keterampilan bersikap pada Pendidikan Kewarganegaraan akan sangat membantu kalau dikemas dalam ceritera tayangan hidup yang menyentuh emosi dan perasaan.

d. Visualisasi Verbal

Cara visualisasi verbal berkaitan dengan membaca (buku, ensiklopedi, lembar kegiatan/kerja, chart, grafik, tabel) yang kadang-kadang tidak hanya berupa teks tetapi juga dilengkapi dengan beragam ilustrasi (gambar). Dengan cara ini maka peserta didik yang memiliki daya imajinasi/abstrak lemah akan terbantu dengan keberadaan alustrasi atau gambar tersebut.

e. Audio Verbal

Cara audio verbal seringkali digunakan dalam bentuk ceramah sehingga peserta didik senantiasa diam pasif sambil mendengarkan penjelasan. Kelemahan cara ini adalah ada sebagian peserta didik tidak mudah menyamakan informasi yang diceramahkan dengan pengetahuan awal peserta didik. Oleh sebab itu untuk mengatasinya, perlu mengurangi kegiatan ceramah ini dan materi yang diceramahkanpun perlu yang kontekstual sesuai pengalaman sebagian besar peserta didik.

2. Fungsi Media

Dalam Proses Pembelajaran terdapat unsur yang amat penting yaitu metode mengajar dan media pengajaran. Keduanya saling terkait. Memilih salah satu metode akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai walaupun masih ada berbagai aspek lain, misalnya tujuan

pengajaran yang diharapkan dikuasai oleh para peserta didik setelah pengajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik peserta didik, meskipun demikian dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru.

Fungsi media pembelajaran lainnya adalah :

- a. Membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap peserta didik. Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pembelajaran pada saat itu (Hamalik, 1986).
- b. Mempengaruhi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman, karena orang yang mendengarkan saja tidaklah sama tingkat pemahamannya, daya ingat apa yang dipahaminya setiap orang berbeda pula, jadi terdapat perbandingan bagi mereka yang melihat atau mendengarnya (Yunus, 1942:78).
- c. Membawa dan membangkitkan rasa senang dan gembira bagi peserta didik-peserta didik dan memperbarui semangat mereka (Ibrahim, 196:432).
- d. Kemp & Dayton, 1985:28, membagi 3 fungsi media :
 - 1) Memotivasi minat atau tindakan
 - 2) Menyajikan informasi
 - 3) Memberi instruksi

3. Jenis Media Menurut Karakteristiknya sebagai berikut:

- a. Media asli dan media tiruan
 - 1) Media Asli untuk mata pelajaran PPKn antara lain:
 - a) Bendera Pusaka
 - b) SK asli Kepala Sekolah
 - c) Film dokumenter asli
 - d) Situs Lubang Buaya
 - e) Gedung-gedung bersejarah
 - f) dsb.
 - 2) Media Tiruan
 - a) Diorama-diorama di museum
 - b) Fotocopy Piagam Jakarta
 - c) Fotocopy Supersemar

b. Media Grafis

Media Grafis adalah bahan pelajaran yang mengajarkan ringkasan informasi dan pesan dalam bentuk lukisan, sketsa, kata-kata simbol, gambar tiruan yang mendekati bentuk aslinya, diagram, dan tanda-tanda lainnya contoh:

- 1) Media bagan (*chart*) penjanjian diagramatik suatu lambang visual meliputi: bagan sistem pemerintahan, chart materi pelajaran, peta konsep pembelajaran, susunan lembaga negara dan lain-lain.
- 2) Media grafik (grafik diagram) yaitu media yang dapat membuat penyajian perlakuan data bilangan secara dragramatis. Contoh grafik hasil pemenang pemilu, grafik jumlah pemilih dalam pemilu, dsb.
- 3) Media poster media yang digunakan untuk menyajikan informasi saran atau ide. Contoh poster gambar calon anggota legislatif

dan calon presiden dan wakil presiden serta calon kepala daerah.

- 4) Media karikatur; yaitu bentuk informasi yang lucu dan mengandung sindiran. Contoh karikatur tentang cara menyebrang jalan, anti korupsi, tawuran pelajar, anti narkoba, tentang HAM dll.
 - 5) Media gambar yaitu media yang merupakan reproduksi bentuk asli dua dimensi. Contoh gambar-gambar pahlawan, gambar tokoh negarawan, dsb.
 - 6) Media komik yaitu media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami dan lebih bersifat personal karenanya berfungsi informatik dan edukatif. Contoh komik perumusan pancasila, komik proses pemilu, dsb.
 - 7) Media gambar bersambung/gambar seri yaitu media grafik yang dipergunakan untuk menerangkan suatu rangkaian perkembangan. Contoh gambar proses pelaksanaan pemilu, dsb.
- c. Media Bentuk Papan
Media yang menggunakan bentuk berupa papan sebagai sarana komunikasi dibedakan atas papan tulis, papan tempel, papan pameran/visual, papan magnet dan lain-lain.
- d. Media yang Disaratkan
Media yang diproyeksikan, dibedakan atas media sarat yang diam, media sarat yang bergerak dan media sarat mikro.
- e. Media Dengar
Mempunyai ciri yang dapat didengar, baik untuk individu maupun kelompok, meliputi radio, piringan hitam.
- f. Media Cetak (*printed materials*)
Merupakan hasil cetak dari bahan instruksional, dapat berbentuk buku, komik.
- Menurut Sadiman dkk (1989) jenis media terdiri dari:
- 1) media foto (gambar)
 - 2) seni grafis
 - 3) bahan belajar tiga dimensi
 - 4) film bingkai (*slide program*)
 - 5) film strip
 - 6) transparansi
 - 7) kaset program
 - 8) radio
 - 9) televisi
 - 10) video

4. Prinsip-Prinsip Pemilihan Media

Pemilihan media pembelajaran harus didasarkan atas kriteria tertentu yang secara umum terdiri dari dua macam, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus.

Kriteria umum:

- a. *Bersifat ekonomis*, dalam arti bila dinilai dengan uang maka tergolong relatif murah. Ekonomis tidak berarti harganya selalu rendah. Bisa saja dana untuk pengadaan media itu cukup tinggi, tetapi bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatannya dan hasilnya maka media itu masih tergolong murah misalnya OHP, Slide proyektor dan lain-lain.
- b. *Bersifat praktis dan sederhana* tidak memerlukan pelayanan khusus atau keterampilan khusus dalam mengoperasionalkannya.
- c. *Mudah diperoleh* dalam arti media itu terdapat di daerah sekitar.

- d. *Bersifat fleksibel*, artinya bisa dimanfaatkan untuk pelbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, nilai budaya, keinginan pelbagai pemakai media itu sendiri, contoh kaset video, isi pesan yang dikandungnya bisa digunakan untuk pencapaian beberapa tujuan instruktusional sesuai dengan budaya setempat atau pemakai jasa media.
- e. *Komponen-komponen sesuai dengan tujuan*, artinya misi, keadaan fisik dan pesan yang dibawa oleh media harus sesuai dengan tujuan.

Kriteria khusus:

- a. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran artinya media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- b. Cara pencapaian tujuan tersebut.
Pencapaian tujuan tersebut melalui belajar sendiri, kelompok atau adanya interaksi antara guru dan peserta didik.
- c. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran.
Bahan pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip dan generalisasi sangat membutuhkan bantuan media agar landas mudah untuk dipahami peserta didik.
- d. Kemudahan memperoleh media
Media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya-tidaknya mudah dibuat oleh guru.
- e. Tingkat kesukarannya
Memilih media harus sesuai dengan taraf berpikir peserta didik, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh peserta didik.
- f. Biaya
Biaya merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan apakah biaya yang dibutuhkan seimbang dengan manfaat serta hasil yang diharapkan dari penggunaan media itu? Perhitungan biaya ini bukan hanya difokuskan pada masalah pengadaan dan pengandaannya saja melainkan juga harus dipertimbangkan pembiayaan pengelolaan, perawatan dan pemeliharannya.
- g. Mutu teknis
Kualitas media harus dipertimbangkan dan harus memenuhi persyaratan hingga pesan yang disampaikan lebih mudah dicerna.
- h. Keterampilan guru dalam menggunakannya
Adapun jenis media yang diperlukan atau yang dipergunakan tiada berarti bila guru tidak mampu untuk menggunakannya. Syarat utama yang diperlukan adalah kemampuan guru dalam menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan terletak pada medianya, tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi dalam proses belajar mengajar.

5. Faktor-faktor dalam memilih media pembelajaran

- a. Obyektivitas
Untuk menghindari pengaruh unsur subyektivitas sebaiknya dalam memilih media pengajaran guru memutus pandangan/pendapat/saran teman sejawat atau melibatkan peserta didik.
- b. Program Pengajaran
Program pengajaran yang disajikan kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- c. Sasaran Program

Sasaran program adalah peserta didik yang akan menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran.

d. Situasi dan kondisi

Meliputi: (a) Sekolah dan ruangan yang akan digunakan (ukurannya, perlengkapannya, ventilasi), dan (b) peserta didik yang mengikuti pelajaran (jumlahnya, motivasi dan minatnya).

e. Kualitas Teknik

Dari segi teknik media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat, sehingga tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar.

f. Keefektifan dan efisiensi penggunaan

Keefektifan berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Keefektifan penggunaan media meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut informasi pengajaran dapat diserap oleh peserta didik secara optimal, sedangkan efisiensi meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut seminimal mungkin.

6. Contoh Media Belajar PPKn

- a. Bahan Cetak : hand out, buku teks, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart
- b. Audio Visual : video/film tentang G 30 S PKI, Proklamasi Kemerdekaan, Sidang PPKI dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, video sidang-sidang kenegaraan, dsb.
- c. Audio : CD/plasdist tentang Pidato Kenegaraan Presiden, Lagu-lagu Wajib, Lagu-lagu perjuangan
- d. Visual : foto/gambar: presiden/wakil presiden, burung garuda, bagan UUD 1945, upacara bendera, contoh gambar dalam mentaati norma-norma, peta Indonesia, dsb.
- e. Multi Media : CD pembelajaran, internet, dsb.

B. Sumber Belajar PPKn

Sumber Belajar dapat diartikan :

1. *Dalam arti sempit*, sumber belajar hanya terkait dengan buku dan bahan-bahan cetak untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar yang didominasi oleh pendidik.
2. *Dalam arti luas*, sumber belajar adalah segala apa yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar guna memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

1. Fungsi Sumber Belajar

Fungsi sumber belajar sebagai berikut:

- a. Menimbulkan kegairahan belajar. Karena bukan guru saya yang dapat dijadikan tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar, melainkan lingkungan sekitar, manusia sumber (nara sumber) juga dapat dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah.
- b. Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Lingkungan yang sudah dirancang oleh pendidik untuk disajikan dalam proses belajar mengajarnya akan memberikan peluang kepada peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya.
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalaman-pengalaman langsung mempunyai nilai tersendiri bagi

- peserta didik yang tetap akan mengakar pada pikirannya untuk waktu yang relatif lama.
- d. Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat kemampuannya.
 - e. Menghilangkan kekacauan penafsiran yang berbeda itu akibat sumber yang digunakan belum bisa menggambarkan atau menjelaskan hakekat/pengertian dari sesuatu yang diajarkan.
2. Macam-macam Sumber Belajar
- a. *Sumber belajar yang direncanakan.* Sumber yang direncanakan yaitu sumber belajar yang memang dengan sengaja direncanakan dan dipersiapkan untuk menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, contoh: laboratorium, ruang media pembelajaran, dsb.
 - b. *Sumber belajar yang tidak direncanakan.* Sumber belajar yang tidak direncanakan yaitu sumber belajar yang pada dasarnya tidak direncanakan dalam kegiatan pendidikan namun karena keadaan dan kondisinya dimungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan maka keadaan atau situasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Contoh rumah sakit pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan kesehatan suatu masyarakat, tetapi rumah sakit tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar apabila seseorang sedang membicarakan pokok bahasan tentang kesehatan. lingkungan alam, lalu lintas jalan raya, suasana sidang DPR/MPR, suasana sidang anggota MA, MK, KY, dsb.

Menurut AECT (*Association of Education Communication Technology*) melalui karyanya "*The Definition of Educational Technology* (1977) mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam:

1. Pesan (*Message*) ialah informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide atau gagasan, fakta, pengertian dan data. Contoh pesan berrantai.
2. Manusia (*people*) ialah orang yang bertindak sebagai penyimpan informasi sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa manusia adalah sumber dari segala sumber belajar. Contoh: tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman tertentu.
3. Bahan (*materials*) ialah perangkat lunak yang mengandung pesan disajikan kepada peserta didik dengan menggunakan perantara melalui alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Contoh: CD, plasdist, kertas transparansi, dsb.
4. Peralatan (*device*) ialah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan (*materials*). Contoh: LCD, OHP, film bingkai, radio, televise, dsb.
5. Teknik/metode (*technique*) yaitu prosedur atau alur yang dipersiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi dan orang untuk menyampaikan pesan. Contoh: sumber belajar yang dirancang adalah ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan sebagainya.
6. Lingkungan (*setting*) yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan disampaikan/ditransmisikan baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, atau non fisik. Suasana belajar contoh sumber belajar yang direncanakan untuk jenis ini adalah ruangan kelas, perpustakaan, auditorium. Sedang sumber belajar yang tidak direncanakan adalah taman rekreasi, kebun, museum, toko, balai kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Perlu diperhatikan bahwa, dalam pemanfaatan sumber belajar hendaknya didasarkan/berorientasi pada ke empat konsensus nasional, yaitu : Pancasila, UUD Negara RI 1945, Negara Kesatuan RI, serta Bhinneka Tunggal Ika.

BAB VIII GURU SEBAGAI PENGEMBANG BUDAYA SEKOLAH

A. Budaya Sekolah

Sekolah merupakan institusi resmi yang ditunjuk Negara dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, Oleh karena itu, guru dianggap sebagai suatu profesi yang tepat untuk mewujudkan harapan tersebut. Guru wajib memiliki kemampuan untuk mengembangkan sekolah sebagai tempat aktivitas belajar, guru dituntut juga agar dapat mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar. Dalam hal ini, guru harus menjadikan sekolah sebagai basis dalam menumbuhkan Budaya sekolah, bagi peserta didik akan menjadikan sekolah sebagai tempat aktivitas belajar.

Begitu banyaknya tuntutan terhadap guru maka guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana, sehingga bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan akademiknya harus menyelesaikannya. Selain itu guru juga harus memiliki kompetensi yang tinggi seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kompetensi profesional tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi (UU RI NO. 14 Th. 2005 pasal 8 dan pasal 10), sehingga guru dapat memiliki kualifikasi mengajar yang tinggi. Untuk mewujudkan kompetensi-kompetensi itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (4) mengatur tentang *Kompetensi pedagogik* yaitu kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
2. pemahaman terhadap peserta didik;
3. pengembangan kurikulum atau silabus;
4. perancangan pembelajaran;
5. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
6. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
7. evaluasi hasil belajar; dan
8. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Sedangkan didalam Pasal 3 Ayat (5) mengatur tentang *Kompetensi kepribadian*, dimana guru diharapkan sekurang-kurangnya memiliki kompetensi kepribadian yang mencakup kepribadian:

1. beriman dan bertakwa;
2. berakhlak mulia;
3. arif dan bijaksana;
4. demokratis;
5. mantap;
6. berwibawa;
7. stabil;
8. dewasa;
9. jujur;
10. sportif;
11. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
12. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
13. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat 6 mengatur mengenai *Kompetensi sosial*, pasal ini menyatakan bahwa guru yang merupakan sebagai bagian dari masyarakat sekurang-kurangnya memiliki kemampuan meliputi:

1. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
2. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
3. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
4. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
5. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 3 ayat 7 mengatur mengenai *Kompetensi profesional*. Dalam hal ini guru diharapkan memiliki kemampuan dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

1. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
2. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Jika guru telah memiliki kompetensi-kompetensi tersebut diperkirakan guru memiliki kemampuan untuk menampilkan figur atau sosok guru sebagai multi fungsi dan keteladanan, dan guru dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu guru dituntut dapat menumbuhkan hubungan yang bersinergi dengan lingkungan di sekitarnya dengan memanfaatkan keadaan lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak bangsa telah pula melakukan peningkatan kualitas guru melalui program pensertifikasian guru. Sejak tahun 2007 pemerintah sudah melakukan pensertifikatan para guru melalui program sertifikasi guru atau yang lebih dikenal dengan istilah PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Tujuannya agar para guru dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas kependidikannya, sehingga guru hendaknya mampu mengelola kelas dengan sebaik-baiknya sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara aktif dan kreatif.

Khusus untuk guru matapelajaran PPKn diharapkan secara aktif dan kreatif dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap dan berperilaku didalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran PPKn di kelas sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik kelas dan sosio-emosional peserta didik. Dengan demikian, didalam pembelajaran PPKn secara fisik kelas dapat dipajang atribut PPKn, seperti lambang negara, foto Presiden dan Wakil Presiden, bendera Negara, foto pahlawan nasional, gambar budaya daerah/nasional, dan sebagainya.

Pembelajaran PPKn bertujuan untuk mengembangkan daya nalar bagi peserta didik, karena difokuskan untuk pembangunan karakter bangsa yang merupakan proses pengembangan warga Negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. Terkait hal itu, maka Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga Negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. Oleh karena itu, kelas PPKn difungsikan sebagai laboratorium demokrasi, dimana setiap siswa dan guru diharapkan dapat memberikan contoh untuk menciptakan suasana kelas/hubungan warga kelas dengan menumbuhkembangkan nilai, norma dan etika Pancasila, misalnya: saling menghormati pemeluk agama yang berbeda, bertegur-sapa bila bertemu, dibiasakan selalu tersenyum, bersalaman pada bapak/ibu guru, menghormati kesepakatan bersama, saling mengunjungi rumah teman, kerjasama dalam menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, kedisiplinan dan keindahan kelas.

Para guru diwajibkan pula menjadi teladan dalam kehidupan rohani dan jasmaninya, sehingga dalam pengembangan kerangka pembelajaran diharapkan diintegrasikan pembelajaran mengenai pembentukan sikap dan penanaman nilai-nilai, seperti yang tertera dalam BAB IV di atas. Pembentukan sikap dan penanaman nilai-nilai merupakan pembinaan terhadap para siswa dalam menumbuhkan kehidupan rohani, selain yang diajarkan didalam pendidikan agama. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keteladannya didalam kehidupan jasmaninya para guru dapat mengarahkan siswanya untuk rajin berolahraga. Kegiatan kehidupan jasmani didalam pelajaran PPKn dapat diwujudkan dengan melakukan kerjabakti di sekolah dan lingkungannya, dengan kegiatan tersebut maka tercipta interaksi dengan sesama teman, siswa, guru dan anggota masyarakat lainnya.

B. Guru Melakukan Kerjasama

Guru sebagai figur sentral dalam pembelajaran diharapkan dapat menciptakan iklim pergaulan guna melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan para guru yang ada di sekolah, peserta didik, orangtua peserta didik dan masyarakat di sekitar sekolah dan lingkungan rumahnya. Dalam melakukan kerjasama dengan para guru lainnya di sekolah, diharapkan guru PPKn dapat menciptakan satu iklim yang kondusif yaitu pembinaan hubungan antara peserta didik, dan antara peserta didik dengan pendidik sehingga tercipta hubungan kemanusiaan yang terbuka, akrab, terarah, saling menghargai, saling membantu dan saling belajar. Iklim yang kondusif akan menciptakan situasi yang baik dan akan mempengaruhi proses pembelajaran. Hubungan kerjasama dengan peserta didik dalam pembelajaran menggunakan prinsip partisipatif, dimana pembelajaran harus:

1. berdasarkan kebutuhan belajar.
2. berorientasi pada tujuan kegiatan belajar.
3. berpusat pada warga belajar.
4. berdasarkan pengalaman.
5. dilakukan bersama oleh warga belajar dengan sumber belajar dalam kelompok yang terorganisasi.
6. merupakan proses kegiatan saling membelajarkan.
7. diarahkan pada tujuan belajar yang hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh warga belajar.
8. menitik beratkan pada sumber-sumber pembelajaran yang tersedia dalam masyarakat.
9. memperhatikan potensi-potensi manusiawi warga belajar.

Pembelajaran dengan prinsip partisipatif harus memperhatikan prinsip proses stimulus dan respons yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kesiapan belajar, latihan, dan munculnya pengaruh pada terjadinya perubahan tingkah laku. Pembelajaran partisipatif sebagai kegiatan belajar lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan individual dan mengutamakan kemampuan pendidik, menekankan pentingnya pengalaman dan pemecahan masalah, dan memfokuskan pada manfaat belajar bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran dengan prinsip partisipatif diharapkan akan tercipta hubungan yang kondusif antara guru dengan para peserta didik. Knowles, (E.Mulyasa,2003) menyebutkan beberapa indikator pembelajaran partisipatif, yaitu :

1. adanya keterlibatan emosional dan mental peserta didik;
2. adanya kesediaan peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan;
3. dalam kegiatan belajar terdapat hal yang menguntungkan peserta didik.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tentang ciri-ciri kegiatan pembelajaran partisipatif yaitu;

1. Guru menempatkan diri pada posisi yang tidak serba mengetahui terhadap semua bahan belajar.
2. Memandang peserta didik sebagai sumber yang mempunyai nilai dan manfaat dalam kegiatan belajar.
3. Guru memainkan peranan membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar.
4. Kegiatan belajar ini didasarkan atas kebutuhan belajar peserta didik.
5. Guru memotivasi peserta didik agar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan dalam mengevaluasi program pembelajaran yang dijalaninya.
6. Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan saling membelajarkan dalam bentuk bertukar pikiran mengenai isi, proses, dan hasil belajar serta pengembangannya.
7. Guru berperan membantu peserta didik dalam menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif, sehingga peserta didik dapat melibatkan diri secara aktif dan bertanggungjawab dalam proses kegiatan pembelajaran.
8. Guru mengembangkan kegiatan belajar kelompok.
9. Guru mendorong peserta didik untuk meningkatkan semangat berprestasi, semangat berkompetisi menghadapi tantangan yang berorientasi pada perbaikan kehidupan yang lebih baik.
10. Guru mendorong dan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah didalam dan terhadap kehidupan yangdihadapinya sehari-hari.
11. Guru dan peserta didik secara bersama-sama mengembangkan kemampuan antisipasi dan partisipasi.
12. Pembelajaran mencapai otonomi dan integrasi dalam kegiatan individual dan kehidupan sosialnya.

Hubungan kerjasama antara guru dengan orang tua peserta didik dan masyarakat harus dapat menciptakan situasi kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agar tidak tercipta situasi kehidupan yang "*chaos (berantakan)*". Nilai-nilai moral diperlukan untuk membangkitkan rasa kemanusiaan supaya timbul rasa saling menghormati dan mengasihi antara satu dan lainnya. Nilai-nilai yang dimaksud berupa aturan-aturan yang mesti disepakati dan dilaksanakan bersama.

Misalnya, di dalam kelas saat pelajaran sedang berlangsung, tidak boleh mengaktifkan alat komunikasi hand-phone (HP); ketika ada teman atau guru yang sedang berbicara yang lain harus mendengarkan; harus menggunakan pakaian yang sopan, tidak boleh tidur saat jam pelajaran; menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Selain itu, dalam berbicara pun harus digunakan adab dan sopan santun dalam berbicara. Misalnya ketika tidak menyetujui pendapat teman atau guru, dengan mengatakan “*menurut hemat saya...*”, “*saya kurang sependapat dengan pendapat A atau Bapak, karena*” Ketika guru mendapati sebuah pendapat yang kurang sopan, misalnya ada murid mengatakan “*pendapatmu itu kurang mutu*”, “*hanya orang bodoh yang berpendapat demikian*”, “*Anda itu kok goblog banget sih, saya kan sudah mengatakan tadi*” dan seterusnya, guru harus menegur murid yang bersangkutan untuk menghindari menggunakan kalimat-kalimat semacam itu. Walaupun penerapan nilai-nilai itu tidak mudah tetapi nilai-nilai moral tersebut harus diinternalisasikan ke dalam sistem kesadaran murid, sehingga tercipta hubungan yang kondusif.

Kesadaran siswa dimaksudkan agar nilai-nilai moral tersebut dapat diterima dan masuk akal bagi murid. Artinya, mereka harus mengerti kegunaan dari aturan-aturan tersebut, dalam hal ini guru harus menjelaskan secara rinci tentang tujuan pemberlakuan nilai-nilai moral tersebut. Guru harus pula dapat memberikan ruang kepada peserta didik, orang tua siswa dan masyarakat yang menolak pemberlakuan nilai-nilai moral tersebut. Tujuannya agar tidak menimbulkan kegelisahan bagi mereka yang tidak menyepakati pelaksanaan aturan tersebut, tetapi guru hendaknya harus memberikan penjelasan akan pentingnya hal tersebut.

Hubungan antara guru dengan guru lain di sekolah juga harus berhubungan dengan masyarakat yang berada di sekolah seperti staf Tata Usaha, petugas kebersihan, tukang sapu, penjaga sekolah atau yang lainnya yang terkategori kurang beruntung dalam strata sosial kita. Guru harus dapat memberikan contoh kepada para siswa dalam melakukan hubungan tersebut sehingga tercipta hubungan yang baik dengan berbagai macam kalangan. Dalam hal ini, nilai-nilai moral tetap harus diterapkan, seperti sopan-santun, menghargai sesama, contoh meminta permissi ketika akan melintas di wilayah yang sedang dibersihkan oleh petugas kebersihan sekolah. Jika guru memberikan contoh yang baik didepan para siswanya maka kemungkinan para siswa akan mengikutinya, karena semua perbuatan guru biasanya ditiru oleh para siswanya.

Dalam rangka pembentukan sikap dan penanaman nilai-nilai terhadap para siswa, maka pembelajaran tidak hanya berada di dalam kelas dan lingkungan sekitar sekolah saja. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan yang ada, seperti lingkungan sosial, alam dan buatan. Terkait dengan pemanfaatan lingkungan sosial, para siswa dan guru dapat bersinergi dalam membina hubungan dengan masyarakat melalui interaksi. Karena melalui interaksi dengan manusia didalam kehidupan sehari-hari, siswa akan memperoleh pengetahuan yang banyak dan langsung diperoleh dari narasumbernya. Selain itu para siswa langsung dapat ditanamkan nilai-nilai yang baik, sekaligus terjadi pembentukan sikap sebagaimana yang ditetapkan lingkungan sekitar.

Hubungan dengan lingkungan bukan hanya pada lingkungan sosial saja tetapi juga pada lingkungan alam. Berdasarkan hal ini, siswa dapat menerima pengetahuan tentang sifat alamiah, seperti keteraturan. Alam telah mengajarkan tentang kehidupan yang penuh dengan keteraturan

dimana matahari terbit selalu dari sebelah Timur dan terbenam selalu disebelah Barat. Oleh karena itu, untuk dapat hidup teratur dengan alam dan lingkungannya dibutuhkan adanya peraturan sehingga akan tercipta keharmonisan antara lingkungan alam, manusia dan lainnya. Jika terjadi pelanggaran maka lingkungan alam menjadi tidak teratur, contoh air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, oleh karena itu tempat yang rendah tidak boleh diadakan bangunan. Jika wilayah penampungan air penuh dengan bangunan maka timbul masalah banjir. Untuk mengatur masyarakat agar tidak menempati daerah penampungan air maka dibutuhkan peraturan pelanggaran, jika masyarakat melanggarnya harus diberikan sanksi tegas. Pemberian sanksi bertujuan untuk menegakkan aturan sehingga siswa dapat memahami begitu pentingnya peraturan ditegakkan.

Hubungan pembelajaran dengan lingkungan bukan hanya pada lingkungan sosial dan alamiah saja tetapi pada lingkungan buatan. Guru dapat mengarahkan para siswanya untuk memperoleh pengetahuan dari lingkungan buatan yaitu lingkungan yang sengaja dibuat manusia untuk tujuan tertentu. Didalam pembelajaran PPKn, pembelajaran dari lingkungan buatan dapat diperoleh dari kehidupan yang teratur, disiplin, kerjasama/saling tolong menolong dan berinterkasi dengan baik, contoh kehidupan di lingkungan perusahaan. Jika di suatu lokasi pemukiman berdiri suatu perusahaan maka perusahaan dan masyarakat sekitar harus dapat hidup saling berdampingan dan menguntungkan (*mutual symbiosis*). Masyarakat dan perusahaan dapat sama-sama saling menguntungkan, perusahaan dapat terus beroperasi sedangkan masyarakat dapat bekerja didalam perusahaan tersebut, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat dapat berdaya. Didalam pembelajaran PPKn pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan sebagai media pembelajaran dengan cara;

1. Survey
 2. Camping atau berkemah
 3. *Fiel trip* atau karyawisata
 4. Praktek lapangan
 5. Mengundang narasumber
 6. Proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat
- Tatacara pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran dapat dilakukan dengan langkah-langkah;

1. Persiapan
Dalam tahap persiapan guru menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KI dan KD, menentukan obyek yang sesuai, menentukan cara belajar, mempersiapkan perizinan, dan persiapan teknis.
2. Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan peserta didik belajar di tempat tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Tindak Lanjut
Pada tahap tindak lanjut dilakukan pembahasan dan mendiskusikan hasil belajar dari lingkungan.

Guru merupakan tokoh yang memiliki peran yang besar guna ikut mengatur maju dan mundurnya suatu bangsa. Jika guru sudah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, seperti yang dipaparkan di atas diharapkan guru sudah memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu guru harus dapat mengimplementasikan pengetahuannya didalam kehidupan masyarakat luas karena guru sebagai figur yang patut untuk

diguguh dan ditiru. Didalam tujuan pembelajaran PPKn dijelaskan bahwa PPKn ingin menghasilkan warganegara yang baik, oleh karena guru sebagai tokoh pendidikan harus dapat memberikan contoh kehidupan sebagai warganegara yang baik didalam masyarakat. Branson (1999:8-9) menegaskan tujuan pembelajaran PPKn (*civic education*) adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu;
2. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris;
3. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan
4. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

Sejalan dengan tujuan pembelajaran PPKn yakni partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Guru harus ikut berpartisipasi didalam kehidupan dilingkungan masyarakat seperti ditingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), Kelurahan, Kecamatan dengan menjadi warganegara yang baik. Keikutsertaan guru untuk berpartisipasi didalam kehidupan dilingkungan masyarakat sekitar rumahnya dengan melakukan kerja bakti, siskamling, menjadi panitia penyelenggara hari-hari besar nasional. Semua itu dilakukan dengan prinsip mengembangkan potensi diri agar menjadi warganegara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab. Keikutsertaan guru didalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKn yang ingin menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*), dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan potensi diri merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Oleh karena itu, guru harus dapat memberikan contoh kepada masyarakat sebagai warganegara yang baik.

BAB IX PENUTUP

Efektifitas dan keberhasilan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) perlu didukung oleh berbagai pihak terutama para pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan, orangtua dan masyarakat, maupun stakeholders lainnya. Diharapkan pembelajaran PPKn juga dapat membentuk peserta didik yang percaya kepada Tuhan YME, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerja keras, jujur, berpengetahuan dan berketerampilan sesuai dengan tuntutan SKL, KI dan KD. Pembelajaran PPKn menggunakan pendekatan scientific, sehingga peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan sebagai proses menjadi seorang scientist.

Buku Pedoman mata pelajaran PPKn menggali berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn dalam rangka penyempurnaan pembelajaran yang berorientasi pada penumbuhan partisipasi, pelibatan, dan pemberian pengalaman belajar peserta didik. Selain itu, buku pedoman ini juga menandu guru untuk menggunakan penilaian autentik sesuai untuk mata pelajaran PPKn. Selain itu, buku pedoman ini juga memandu guru PPKn untuk mengoptimalkan pemanfaatan media, alat dan sumber belajar.

Akhir kata, keberhasilan implementasi mata pelajaran PPKn berpulang pada iktikad baik pelaku pendidikan secara keseluruhan. Keberhasilan akan kita raih bila ada niat ikhlas, semangat, dan sikap batin untuk membuka dan memperbaiki diri.